

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PNPM-MP DI DESA WIOI KECAMATAN RATAHAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Oleh

CHRISTMAS BOWIE KUHU

Abstrak

Yang menjadi salah satu permasalahan dalam pembangunan adalah isu jender, dimana peranan perempuan agak dikesampingkan sehingga mereka tidak dapat menyalurkan potensi yang mereka miliki terutama untuk peningkatan taraf hidup mereka. Selama ini yang terjadi adalah kondisi social yang sangat menonjolkan peran laki-laki. Laki-laki dianggap kaum yang derajatnya lebih tinggi dari pada perempuan, sehingga laki-laki memiliki hak yang lebih besar baik dalam mengatur rumah tangga, memperoleh pendidikan, mengeluarkan pendapat, maupun dalam pengambilan keputusan. Hal ini tentunya menyebabkan perempuan menjadi kaum marginal yang selalu terpinggir dan tergusur. Menjawab tantangan tersebut, dalam penanganan masalah kemiskinan yang dialami masyarakat Indonesia dengan cara melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat tersebut, maka presiden mengeluarkan Perpres No. 54 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), yang bertugas untuk merumuskan langkah-langkah kongkrit dalam penanggulangan kemiskinan. Pada sidang kabinet tanggal 7 September 2006, presiden menetapkan kebijakan pemerintah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui pemberdayaan masyarakat. Pada tanggal 12 September 2006 Menko Kesra, Menko Perekonomian dan menteri-menteri terkait sepakat "Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)" sebagai instrumen dalam percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja. Ditindaklanjuti Menko kesra mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk alokasi dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat), Mandagri minta gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan usulan lokasi, Bappenas merancang pendanaan PNPM. Presiden RI kemudian menyempurnakan nama PNPM menjadi PNPM_Mandiri.

Key Words : IMPLEMENTASI, KEBIJAKAN

A. Pendahuluan

a. Latar belakang masalah

Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang dialami bangsa Indonesia sejak tahun 1997 telah membawa dampak yang sangat luas bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, baik aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan aspek lainnya. Krisis ini telah membawa penderitaan bagi bangsa Indonesia, terutama bagi masyarakat miskin yang semakin miskin,

ditambah lagi utang luar negeri yang sangat besar yang merupakan warisan dari pemerintahan Orde Baru.

Jika dilihat dari sudut pandang politik dan ketatanegaraan melalui system sentralisasi dan hegemoni Negara atas seluruh aspek kehidupan bernegara, kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru diarahkan secara strategis sebagai upaya penaklukan dan stabilitas yang tercantum dalam Trilogi Pembangunan. Pada masa ini dapat dikatakan hanya mempersiapkan struktur kekuasaan hirarkis yang menguasai satuan-satuan kewilayahan dan wilayah privat atau pribadi.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, pembanguna tidak didasarkan pada permasalahan strategis rakyat, melainkan atas dasar kebutuhan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional melalui suatu regulasi terpusat yang komprehensif dan bertahap. Pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan mampu menetas ke daerah-daerah dengan sendirinya (trickle down effect). Kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru di atas merupakan suatu indikator atau penyebab terjadinya krisis multidimensional yang dialami bangsa Indonesia.

Dampak dari krisis yang dialami bangsa Indonesia sejak tahun 1997 yang paling nyata yakni kehidupan masyarakat miskin yang semakin miskin. Kemiskinan pada dasarnya bukan hanya permasalahan ekonomi tetapi lebih bersifat multidimensional dengan akar permasalahan terletak pada system ekonomi dan politik Bangsa.

Dimana kebijakan yang ditetapkan pemerintah terkadang malah membuat hidup masyarakat makin terasa sulit dari segi ekonomi khususnya, sehingga mereka tidak memiliki akses yang memadai dalam kehidupan sehari-hari. Yang sering terjadi ketika kelompok masyarakat hidup dalam bayang-bayang kemiskinan, mereka menjadi terpinggirkan, bahkan terabaikan.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang harus segera tuntas karena keadaan kemiskinan membuat bangsa Indonesia menjadi lemah dan tidak bermartabat. Dalam masa krisis masyarakat miskin sangat sulit untuk bangkit karena ketidakberdayaan masyarakat itu sendiri. Hal ini khususnya terjadi pada masyarakat pedesaan, karena potensi yang ada pada masyarakat desa umumnya lebih rendah jika dibandingkan dengan masyarakat kota, terutama dari segi sumber daya manusianya sehingga masyarakat desa tidak memiliki kemampuan yang baik untuk membangun walaupun didukung sumber daya alam yang melimpah.

B. Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Wioi, Kec. Ratahan Timur, Kab. Minahasa Tenggara.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Program PNPM di Desa Wioi.

C. Tinjauan pustaka/teori

- Definisi Program

Dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berkesimbangan, dapat dilakukan melalui penetapan sebuah program atau proyek pembangunan yang perumusannya dilakukan melalui perencanaan program. Program dapat dirumuskan sebagai perangkat kegiatan yang saling tergantung dan diarahkan pada satu atau beberapa tujuan khusus.

Penyusunan program dalam proses perencanaan sosial mencakup keputusan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam proses perumusan program (Suharto,2005:71), ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.

- Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

kebijakan public menurut Thomas dye (tangkilisan, 2003:1) adalah apapun pilihan pemerintahan untuk melakukan ataupun tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan public mencakup suatu yang tidak di lakukan oleh pemerintah di samping yang di lakukan oleh pemerintah menghadapi suatu masalah public.

Easton (1969) memberikan pengertian kebijakan public sebagai pengelokasian nilai-nilai kekuasaan untuk semua masyarakat yang keberadaannya meningkat. Sehingga pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari suatu yang di pilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Anderson (tangkilisan, 2003:2), kebijakan public sebagai kebijakan-kebijakan yang di bangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan itu adalah:

1. Kebijakan public selalu punya tujuan tertentu atau mempunyai tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Kebijakan public berisi tindakan-tindakan pemerintahan
3. Kebijakan public merupakan apa yang masih di maksudkan untuk dilakukan.

4. Kebijakan public yang di ambil bias bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala suatu masalah tertentu, atau bersifat negative dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Kebijakan pemerintahan setidak-tidaknya dalam artiyang positif di dasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

b. Kategori Kebijakan Publik

Dalam H Soenarko (2003:61), Joiynt mengatakan bahwa kebijaksanaan itu dapat berarti yang berbeda-beda untuk orang-orang yang berbedah. Usaha untuk mengadakan klasifikasi/tingkatan-tingkatan kebijaksanaan itu adalah seperti halnya membagi-bagi tingkatan suhu udara.

Menanggapi hal tersebut, maka A. Simon kemudian dapat membagi klasifikasi kebijakan itu menjadi tiga macam policy, yaitu:

1. Legislative policy, kebijaksanaan yang di buat landasan dan pegangan bagi pemimpin (management) dalam melaksanakan tugasnya, atau kebijaksanaan yang banyak mengandung norma-norma yang harus di selenggarakan oleh pemimpin tersebut. Oleh karena itu, kebijaksanaan ini lebih banyak member ketentuan-ketentuan yang mengandung pemaerian hak-hak, kewajiban, larangan-larangan dan keharusan-keharusan, dan lebih banyak di buat pleh legislatif.
2. Management policy, merupakan peraturan-peraturan yang di buat oleh pimpinan pusat (top-management) atau pejabat-pejabat teras.

3. Working policy, yaitu kebijaksanaan lainnya yang di buat untuk pelaksanaan (operation) di lapangan untuk tercapainya tujuan akhir yang tersimpulkan dari kebijaksanaan itu.

- **Pengertian Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka. Oleh karena itulah implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting dalam kebijakan public.

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood (Tangkilisan, 2003: 17), hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Sementara menurut Pressman dan Widalvsky (1984), implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-saranatindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kausal antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Putra, Fadilah, 3003:81) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok, pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana di sediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. Dan merupakan salah satu tahap atau variable penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan di dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.

- **Konsep Pemberdayaan**

Menurut Wrihatnolo dan Riant (2007:1), istilah pemberdayaan diambil dari bahasa asing, yaitu empowerment, yaitu juga dapat bermakna pemberian kekuasaan karena power bukan sekedar daya, tetapi juga kekuasaan sehingga kata daya tidak saja bermakna mampu, tetapi juga mempunyai kuasa.

Menurut Siahaan, Rambe, dan Mahidin (2006:11), pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok, sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana tuntutan kinerja tugas tersebut. Pemberdayaan merupakan proses yang dapat dilakukan melalui berbagai upaya ,

seperti pemberian wewenang, meningkatkan partisipasi, memberikan kepercayaan sehingga setiap orang atau kelompok dapat memahami apa yang dikerjakannya, yang pada akhirnya akan berimplikasi pada peningkatan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien (Siahaan, Rambe, Mahadi, 2006:13). Selanjutnya menurut Sumodiningrat (1999:134), pemberdayaan berarti meningkatkan kemampuan atau kemandirian.

- **Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)**

a. Gambaran Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri)

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

PNPM adalah kerangka bagi konsolidasi program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas program dalam mempercepat penanggulangan

Kemiskinan, meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui tahap pembelajaran masyarakat, tahap kemandirian masyarakat, tahap keberlanjutan pembentukan kelompok masyarakat menjadi modal sosial yang membuka secara penuh dan mendekatkan sumber daya capital atau modal ekonomi langsung kepada masyarakat.

b. Dasar Kebijakan PNPM Mandiri

Perpres No. 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), yaitu diketuai oleh Menkokesra dan bertugas untuk merumuskan langkah-langkah kongkrit dalam penanggulangan kemiskinan. Hasil Sidang Kabinet pada tanggal 7 September 2006: diperlukan percepatan penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Selanjutnya TKPK pada tanggal 12 September menyepakati untuk menindaklanjuti hasil sidang cabinet tersebut dengan merumuskan sebuah program yang bernama PNPM. Menkokesra kemudian menerbitkan SK Menkokesra No. 28/Kep/Menko/Kesra/XI/2006 yang diperbaharui dengan Menkokesra No. 23/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 tentang Tim Pengendali PNPM Mandiri.

c. Tujuan PNPM Mandiri

1. Tujuan Umum

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

2. Tujuan Khusus

1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representative, dan akuntabel.
3. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*).
4. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan local.
7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

d. Ciri-ciri Utama PNPM Mandiri

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri mempunyai ciri-ciri utama sebagai berikut:

- i. Menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat.
- ii. Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat.
- iii. Kegiatan di laksanakan secara swakelola oleh masyarakat.

e. Prinsip dasar PNPM Mandiri

PNPM Mandiri menekankan prinsip-prinsip dasar berikut ini:

1. **Bertumpuh pada pembangunan manusia**
2. **Otonomi**
3. **Desentralisasi**
4. **Berorientasi pada masyarakat miskin**
5. **Partisipasi**
6. **Kesetaraan dan keadilan gender**
7. **Demokratis**
8. **Transparansi dan Akuntabel**
9. **Prioritas**
10. **Kolaborasi**
11. **Keberlanjutan**
12. **Sederhana**

f. Sasaran PNPM Mandiri Pedesaan

i. *Lokasi Sasaran*

Pada tahun 2009, lokasi PNPM Mandiri Pedesaan meliputi seluruh kecamatan pedesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Untuk tahun 2008, ketentuan pemilihan lokasi sasaran berdasarkan ketentuan:

- a. Kecamatan-kecamatan yang tidak termasuk kategori “kecamatan bermasalah dalam PPK”
- b. Kecamatan-kecamatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah dalam skema kontribusi pendanaan.

ii. *Kelompok Sasaran*

- a. Rumah Tangga Miskin (RTM)
- b. Kelembagaan masyarakat di pedesaan
- c. Kelembagaan pemerintah local

g. Pendekatan PNPM Mandiri

Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program adalah pembangunan yang berbasis masyarakat dengan :

1. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.
2. Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan pelaku utama pembangunan pada tingkat local
3. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif
4. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan.

D. Pembahasan (analisis)

1. Pemahaman Informan terhadap PNPM Mandiri Pedesaan

Ketika peneliti melakukan wawancara terhadap informan, dapat diketahui bahwa PNPM MP merupakan suatu program yang sangat baik untuk dijalankan karena member dampak positif bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara dibawah ini:

“Program PNPM MP sangat bagus untuk dilaksanakan, karena dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, mempermudah hidup masyarakat seperti saat ini sudah banyak jalan yang dibuka. PNPM MP juga mendidik masyarakat untuk dapat berkegiatan.” (Wawancara dengan Kepala BPD)

2. Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Kelompok SPP

Dibentuknya program SPP bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan para perempuan agar mampu mandiri dan tidak hanya bergantung pada suami mereka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Karena SPP ini sasaran utamanya adanya kaum perempuan maka partisipasi dari kaum perempuan tersebut juga harus ditingkatkan. Di Desa Wioi dalam program SPP partisipasi perempuan terlihat dari keterlibatan perempuan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya, sesuai dengan PTO masyarakat (perempuan) juga turut mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan, apakah sudah sesuai dengan peraturan atau tidak. Hal ini diungkapkan sesuai dengan kutipan wawancara dibawah ini: *“Semua masyarakat yang ada di desa ini kan telah di undang baik laki-laki maupun perempuan. Mulai dari MAD Sosialisasi, MD Sosialisasi, MAD 2 Perencanaan dan MKP, MD 2 Penetapan usulan, serta MD 3 Informasi. Kami ingin melibatkan masyarakat walaupun tidak semua masyarakat yang hadir. Dan dalam pelaksanaannya masyarakat juga ikut mengawasi.”* (Wawancara dengan Bapak DM selaku PJOK)

3. Pelaksanaan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan

Pelaksanaan kegiatan PNPM MP di Desa Wioi dimulai setelah melaksanakan Musyawarah Desa Informasi (MD Informasi). Dalam musyawarah ini telah ditentukan kesepakatan dan ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan PNPM MP di Desa Wioi sesuai dengan hasil musyawarah khusus perempuan dan musyawarah campuran. Seperti kutipan hasil wawancara berikut: *“Seluruh kegiatan PNPM dilakukan setelah musyawarah akhir yaitu Musyawarah Desa Informasi.*

Dalam musyawarah ini telah ditetapkan kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk anggaran tahun ini. Setelah itu dana akan dicairkan secara berkala” (Wawancara Bapak BP selaku ketua TPK).

4. Partisipasi Anggota (Perempuan) dalam Kelompok

Pada kelompok SPP seluruh anggota yang terdapat di dalamnya 100% adalah perempuan. Hal ini sesuai dengan peraturan dalam PTO (Petunjuk Teknis Operasional) dan MKP yang telah dilaksanakan. Partisipasi dari setiap anggota sangat diharapkan dalam kelompok. Pembagian tugas harus jelas yakni adanya ketua, sekretaris, bendahara dan anggota. Ketua bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dalam kelompok. Sekretaris dan bendahara juga bertugas untuk mendukung pertanggungjawaban dari ketua atas pelaksanaan seluruh kegiatan dalam kelompok. Hal di atas sesuai dengan kutipan wawancara dibawah ini: *“Masing-masing kelompok, kami terdiri dari 10 orang. Dalam kelompok harus ada ketua, sekretaris dan bendahara. Tugas kami masing-masing sudah diatur waktu pembinaan kemarin”* (Wawancara dengan Ibu SP selaku Ketua Kelompok Turut Maju).

5. Isu Gender dalam PNPM MP

Dalam PTO (petunjuk teknis operasional) salah satu prinsip yang di junjung tinggi yakni adanya kesetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan. Peran laki-laki dan perempuan di samakan baik dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pelaksanaannya.

6. Hambatan-hambatan dalam kelompok spp

Dalam pelaksanaan kegiatan spp berdasarkan PTO, bahwa setiap anggota kelompok yang bertanggung jawab terhadap kelompok masing-masing atas pengembalian dana pinjaman (rencana angsuran anggota ke kelompok) dan disetiap bulannya laporan dari setiap kelompok harus ada kepada UPK (Akad Kredit kelompok SPP). Dalam hal ini kelompok

menyerahkan cicilan dana yang di pinjam kepada UPK. Di desa wioi hal ini di jalankan sesuai dengan PTO, namun ada beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya, seperti kuipan wawancara di bawah ini: *“terkadang ada anggota dari kelompok SPP yang mengeluh kepada saya kalau ada anggota mereka yang selalu terlambat menyetor kepada bendahara. Jadi mereka terpaksa patungan untuk menutupi kekurangan uang yang akan di setor kepada UPK.”* (wawancara dengan kepala desaWIOI).

7. Inkonsistensi Pelaksanaan Kegiatan pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan

Bila pembangunan diartikan sebagai suatu proses perubahan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dan lebih bermakna. Maka dapat dikatakan bahwa dalam proses pembangunan tersebut akan meliputi beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan dalam suatu pembangunan sangatlah diperlukan. Dalam tahap ini terdapat aktifitas-aktifitas untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan sebagai pendukung untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam suatu kebijakan, implementasi merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara efektif. Implementasi ini merupakan pelaksanaan aneka program yang dimaksudkan dalam suatu kebijakan. Ini adalah suatu aspek proses kebijakan, yang amat sulit dalam menentukan hasil dari kebijakan tertentu.

Dalam pelaksanaan suatu program untuk encapai hasil yang diinginkan harus mendapat dukungan dari setiap orang yang terlihat di dalamnya. Satu hal yang tidak kalah penting yakni pelaksanaan yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah di tetapkan dan disetujui bersama oleh anggota.

Demikian halnya dalam pelaksanaan kegiatan Kelompok SPP yang ada di Desa Wioi, ada aturan yang harus dipatuhi yang tertuang dalam PTO (Petunjuk Teknis Operasional) yang menjadi pedoman setiap yang ada didalamnya untuk bertindak. Apabila dukungan masyarakat dalam pelaksanaan seimbang dengan aturan yang telah ditetapkan maka hasil yang akan diperoleh pasti akan member dampak yang positif.

Pelaksanaan kegiatan Kelompok SPP di Desa Wioi secara umum berjalan dengan baik, sebab tidak sedikit yang telah merasakan manfaatnya. Antusias masyarakat untuk turut serta berpartisipasi didalamnya juga terlihat di desa ini, namun ada beberapa kendala yang dihadapi masyarakat untuk turut berpartisipasi, yakni :

a. Ekonomi

Setiap manusia memiliki kebutuhan masing-masing, untuk memenuhi kebutuhan hidup ini maka setiap manusia harus melakukan kegiatan ekonomi. Setiap kegiatan yang dilaksanakn oleh setiap manusia beraneka ragam. Adapun kegiatan ekonomi berupa kegiatan dalam bidang pertanian, perdagangan, jasa, perindustrian dan lain-lain. Dengan melaksanakan kegiatan ekonomi ini maka masyarakat akan memperoleh suatu imbalan, dan imbalan inilah yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat yang tinggal di desa Wioi sebagian besar tergolong dalam Rumah Tangga Miskin (RTM) dan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka harus bekerja sebagai petani. Namun ada juga yang memiliki usaha sampingan yakni berjualan. Seperti pernyataan dari Kepala Desa Wioi bahwa lebih dari 75% masyarakat desa Wioi tergolong masyarakat kurang mampu. Rendahnya pendapatan masyarakat membuat mereka hidup serba kekurangan, sehingga mereka harus tetap bekerja agar dapat memenuhi kehidupan sehari-hari. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara peneliti Bapak JT, rendahnya pendapatan masyarakat ternyata sangat berdampak pada partisipasi mereka dalam kegiatan yang ada dalam PNPM MP. Ia mengatakan bahwa ada beberapa masyarakat yang tidak mau menjadi anggota SPP sebab mereka merasa tidak mampu untuk mengolah dan mengembalikan cicilannya.

b. Sumber Daya Maanusia

Salah satu modal utama dalam pembangunan adalah sumber daya manusia yang terlibat didalamnya. Dengan adanya sumber daya manusia yang baik maka mereka akan bersikap lebih reaktif dalam mengatasi masalah kemiskinan. Sumber daya amnesia dapat dilihat dari wawasan yang dimiliki masyarakat serta tingkat pendidikannya. Di Desa Wioi mayoritas masyarakatnya memiliki SDM yang masih tergolong rendah.

E. Penutup

- Kesimpulan

1. Pelaksanaan PNPM MP di Desa Wioi pada kelompok SPP secara umum memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat walaupun tidak berjalan dengan baik. Masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup mereka dengan adanya bantuan modal untuk usaha. Saat ini Kelompok SPP yang ada di Desa Wioi masih dalam tahap pengembangan.
2. Masih terdapat konsistensi pelaksanaan yang tidak sesuai PTO (Petunjuk Teknis Operasional) dan lemahnya peranan dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Masyarakat yang seharusnya tidak berhak mendapat bantuan tetap mendapat bantuan sehingga hak orang lain dikorbankan.

Sealin itu masih ada anggota kelompok yang menyalagunakan SPP. Uang yang seharusnya digunakan untuk modal usaha, digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Partisipasi masyarakat yang terutama perempuan dalam Kelompok SPP masih tergolong rendah, hal ini terlihat karena tidak semua perempuan yang ada di Desa Wioi turut serta di dalamnya.
4. Pembagian tugas dalam kelompok antara ketua, bendahara dan sekretaris tidak berjalan seimbang. Ketua memegang kendali penuh atas kelompok sehingga kegiatan kelompok tidak berjalan dengan baik.
5. Dalam pelaksanaan PNPM MP di Desa Wioi masih terdapat kasus gender, yakni adanya peran ganda dari ibu-ibu yang selain mencari nafkah juga harus mengurus pekerjaan rumah tangga dan anak-anak mereka, serta adanya pengaruh kekuasaan atau jabatan seseorang yang diterapkan dalam PNPM MP di Desa Wioi. Seseorang yang menjabat sekretaris desa sekaligus sebagai bendahara UPK dapat mengikutsertakan istrinya yang merupakan seorang PNS sebagai SPP. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai masalah gender juga terlihat dari pelaku-pelaku PNPM MP yang ada di Desa Wioi dimana para pelakunya didominasi oleh kaum laki-laki.
6. Masalah ekonomi dan SDM yang rendah menjadi penghambat utama masyarakat desa wioi terutama perempuan untuk dapat turut serta dalam kegiatan kelompok SPP.

- **Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti berikan sesuai dengan analisa pelaksanaan PNPM MP pada kelompok SPP di desa wioi adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya sebelum melakukan pelaksanaan kegiatan program PNPM MP, pihak yang terlibat di dalamnya sebagai pengurus harus mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya keterlibatan mereka, sehingga kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi akan lebih baik.
2. Untuk mencapai tujuan yang di inginkan yakni adanya pemberdayaan dan kemandirian perempuan dalam kelompok SPP, pelaksanaan harus di sesuaikan dengan pedoman dan aturan yang tertuang dalam PTO. Pengawasan yang di lakukan olehBPK juga perlu di tingkatkan sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
3. Pemerintah sebaiknya memberikan pengarahan dan penjelasan tentang masalah gender kepada setiap pihak yang terlibat dalam PNPM MP, sehingga pola pikir masyarakat tentang budaya patriakhi dapat berubah.

4. Pelatihan bagi kelompok SPP yakni ketua, sekretaris dan bendahara perlu di lakukan, sehingga mereka dapat mengelolah kegiatan yang ada dalam kelompok dengan baik serta adanya pembagian tugas yang seimbang.

4. DAFTAR PUSAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ismail, M. Irfan. 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi aksara: Jakarta.
- Itsna, Sugihastuti, 2007. *Gender dan Inferioritas Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Juliantara, Dadang. 2004. *Pembaharu Kabupaten Partisipasi*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Kaho, Josef. 2007. *Profek Otonomi Daerah di Daerah Republik Indonesia*. Jakarta: PT RajaGarfindo.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Jakarta: Bappenas
- Kumorotomo, Wahyudi. 1990. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Murniati, Nunuk. 2004. *Getar Gender*. Magelang: Yayasan Indonesia Tera.
- Nawawi. 1990. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: UGM Press Ndraha, Taliziduhu. 1990.
- Pembangunan masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigm kritis dalam studi kebijakan publik*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar
- Siahaan, ddk. 2006. *Manajemen pengawas pendidikan*. Jakarta: Quantum Teaching
- Singarimbun, Masri, Sofyan Efendi. 2006. *Metode penelitian survei*. Jakarta: LP3ES Soegijoko dan Kusbiantoro. 1997. *Bunga rampai perencanaan pembangunan di Indonesia*. Jakarta: grasindo
- Soekarno SD, H. 2003. *Publik policy, pengertian pokok untuk memahami dan menganalisa kebijakan public*. Surabaya: Airlangga University Press
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis kebijakan public: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar

- Sugiyono. 2008. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharto, Edi, dkk. 2005. *Kemiskinan dan keberfungsian sosial: studi kasus rumah tangga miskin di Indonesia*. Bandung: STKS Press
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan masyarakat dan JPS*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode penelitian sosial berbagai alternative pendekatan*. Jakarta: Pranada Media
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. *kebijakan public yang membumi*. Yogyakarta: YPAPI dan Lukman Offset.
2005. *Manajemen public*. Jakarta: PT Grasindo.
- Wrihatnolo, dkk. 2007. *Manajemen pemberdayaan, sebuah pengantar dan paduan untuk pemberdayaan masyarakat*. Jakarta

Sumber lain:

Undang-Undang Dasar 1945.

Tim Koordinasi PNPM MP, Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan. Jakarta.

<http://www.pnpm-mandiri.org/22/02/2010>

<http://www.p2kp.org/22/02/2010>

<http://www.pemberdayaan.com/pembangunan/pemberdayaan-masyarakat-dan-pembangunan-berkelanjutan.html/20/02/2010>